

Judul : Kemendes PD TT Kudu Serap Aspirasi Dewan
Tanggal : Kamis, 20 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Permintaan Komisi V Kemendes PD TT Kudu Serap Aspirasi Dewan

WAKIL Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw menyoroti kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PD TT). Kementerian diminta memperhatikan aspirasi para anggota terkait program-program pembangunan desa di daerah pemilihan masing-masing.

Roberth bilang, persoalan aspirasi anggota tidak boleh mengakomodir warna tertentu saja. "Tolong sampaikan ke Bapak Menteri (Mendes PD TT Abdul Halim Iskandar), jangan sampai nanti Pak Menteri datang rapat cuma (dihadiri) satu partai di dalam," *warning* Roberth Rouw dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I Kemendes PD TT di Jakarta, kemarin.

Pernyataan keras Roberth ini merespons keluhan dan kritik dari mayoritas anggota komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi ini. Bahwa, aspirasi anggota terhadap persoalan dana desa dan rekrutmen pendamping desa kurang direspons.

Roberth lalu merujuk Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kemendes PD TT. Badan ini menerima anggaran paling besar dari eselon I lainnya namun mendapat keluhan paling banyak dari dewan. Robert bahkan mengaku termasuk salah satu yang belum pernah merasakan atau komunikasi dengan program andalan di kementerian ini tentang pendamping desa.

Dia bilang, dewan mempunyai kewenangan untuk membahas APBN meliputi rencana kerja pemerintah, serta rencana kerja kementerian/lembaga. Dewan bisa mengusulkan program pembangunan anggota dapil bersama pemerintah.

"Saya tidak melihat ada satu pun keikutsertaan anggota memberikan program 2022. OK, silakan ada program yang sekarang kita melakukan pendalaman yang menjadi perhatian yaitu pendamping desa. Itu ada sekian banyak. Tolong berikan ruang aspirasi anggota untuk daerahnya," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi dapil Papua ini menegaskan persoalan aspirasi anggota merupakan konstitusi dan tidak boleh dihalang-halangi. Program-program bagi masyarakat yang ada di Kemendes PD TT pun merupakan program pemerintah yang tidak boleh dibawa ke urusan politik. ■ KAL